

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan seperti perbankan menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah perekonomian negara, karena tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, perbankan juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara menyeluruh. Perbankan Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat menuju akhir 1980-an. Perbankan sebagai salah satu industry keuangan di Indonesia memiliki peran intermediasi (*financial intermediaries*) yaitu ,lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Perbankan memegang peran besar dalam hal pendanaan terutama dalam hal pendanaan eksternal. Pendanaan oleh perbankan ini terus mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat baik dalam penguatan modal hingga investasi terhadap pembangunan negara. Maka tidak heran jika perbankan menjadi lembaga keuangan yang penuh atensi pemerintah hingga mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Perkembangan perbankan dalam hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah aset bank, kemampuan bank dalam menghimpun dana dan penyaluran kredit yang terus meningkat bahkan lebih dari 500 persen sejak tahun 1989 sampai tahun 1996 (Laporan Bank Indonesia).

Penyaluran kredit menjadi aktivitas utama perbankan sebagai pihak intermediasi. Kegiatan ini merupakan wujud dari fungsi perbankan sebagai

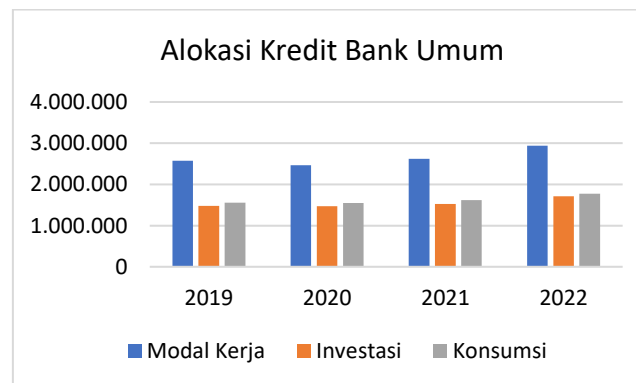
lembaga perantara dalam menyalurkan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar (Wangsawidjaja, 2020). Bagi bank kredit merupakan sumber penghasilan mereka sedangkan bagi masyarakat luas kredit merupakan sumber modal investasi, distribusi, dan juga konsumsi. Kredit menjadi pengalokasian dana bank prioritas ketiga setelah cadangan primer dan cadangan sekunder. Mengingat kredit merupakan aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi. Sehingga, pada penyaluran kredit ini, pihak perbankan dituntut untuk bisa memainkan perannya dalam mengalokasikan dana serta melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana tersebut telah tersalurkan pada kegiatan ekonomi prioritas yang memberikan keuntungan secara optimal. Sehingga, sektor ekonomi akan bergerak lancar, masalah kredit yang merugikan perusahaan dapat dihindari dan pertumbuhan ekonomi akan terdorong.

Setiap tahunnya penyaluran kredit oleh perbankan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini wajar terjadi lantaran Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan pembangunan di segala bidang.

Ketersediaan uang atau modal sangat diperlukan sebagai penunjang pembangunan tersebut. Banyak perusahaan yang mengandalkan pendanaan dari bank untuk menutupi kekurangan modal. Keterbatasan uang yang dimiliki masyarakat mendorong kebutuhan masyarakat untuk meminjam guna memenuhi macam - macam kebutuhan mereka. Salah satunya adalah melalui kredit bank yang diajukan masyarakat terutama pada bank umum. Bank umum dalam hal ini memiliki berbagai macam jenis kredit. Macam – macam kredit dibedakan berdasarkan kegunaan dan jangka waktu peminjaman . Adapun kredit menurut jenis penggunaan dapat dibagi menjadi kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja, sedangkan kredit berdasarkan jangka waktu pengembalian antara lain, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

Diagram 1

Alokasi Kredit Bank Umum Tahun 2019-2022



Sumber : BI, 2023 (data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat jika dalam beberapa tahun terakhir posisi pinjaman kredit terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, di mana posisi

pinjaman terbesar selalu diduduki oleh kredit modal kerja (KMK), yaitu sebesar 2.576.497 per desember tahun 2019, 2.465.419 pada tahun 2020, dan terus mengalami kenaikan di tahun berikutnya yakni, 2.621.250 di tahun 2021 dan 2.940.289 di tahun 2022. Posisi pinjaman kredit modal kerja (KMK) ini disusul oleh kredit konsumsi dan kredit investasi dengan rata - rata proporsi kredit 43 % untuk kredit modal kerja, 29% kredit konsumsi dan terakhir 28% kredit investasi. KMK menjadi kredit dengan proporsi terbesar karena memiliki efek multiplier yang besar. Terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan pembangunan di berbagai sektor. Kredit menjadi solusi pembiayaan yang efektif.

Sejalan dengan fungsi kredit sebagai solusi pembiayaan yang efektif untuk pembangunan sektor, sektor perikanan yang selama ini dikenal sangat potensial justru menjadi salah satu sektor yang memiliki alokasi kredit yang minim. Hal ini tercermin sebagai berikut.

Diagram 2

**Alokasi Kredit Bank Umum untuk Sektor Perikanan
Tahun 2019 - 2022**



Sumber : OJK 2023 (data diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jika beberapa tahun terakhir alokasi kredit bank umum pada sektor perikanan mengalami tren positif setiap tahunnya. Dilansir dari OJK ternyata selama ini kredit pada sektor perikanan dinilai masih relatif minim dibandingkan dengan potensi perikanan Indonesia. Terlihat dari penyaluran kredit yang diberikan masih sebesar 0,24 persen dari total kredit yang diberikan bank umum per 2019.

Perbankan sebagai *engine of growth* dinilai kurang memberikan kontribusinya pada sektor ini. Pihak bank dinilai masih terlalu cemas untuk mengambil resiko yang dinilai masih relatif tinggi. Pasalnya penghasilan nelayan yang tidak pasti dan agunan yang tidak mudah dijual menjadi beberapa alasan bank enggan menyalurkan kredit ke sektor perikanan, terutama pada perikanan tradisional. Sulitnya akses pembiayaan perbankan pada sektor ini juga di tunjukkan dari sulitnya persyaratan yang diminta bank seperti, agunan kapal yang layak, legalitas usaha, dan bunga yang masih tinggi. Sementara itu, sektor perikanan merupakan sektor padat modal yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk segala aktivitas ekonominya seperti, pengadaan kapal dan alat tangkap, modal melaut, serta perbaikan kapal dan lain sebagainya.

Banyak sekali nelayan terutama nelayan tradisional yang masih belum mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sumber dana dari lembaga perbankan untuk mengembangkan usaha mereka. Akibatnya kesejahteraan mereka pun masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor – sektor lain. Kondisi ini harus segera dibenahi untuk menciptakan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang selaras dengan

karakteristik nelayan skala kecil (Chuenpagdee, 2020), karena kontribusi nelayan skala kecil yang memiliki kearifan lokal dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, juga merupakan nilai strategis mengelola perikanan yang berkelanjutan dan mengembangkan pariwisata bahari berbasis budaya. Partisipasi nelayan skala kecil tidak hanya terlalu besar untuk diabaikan, tetapi juga terlalu penting untuk gagal/tidak berhasil (United Nations, 2022). Terkait hal itu maka dibutuhkan skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan siklus bisnis para pelaku usaha di sektor ini, terutama nelayan tradisional.

Dalam rangka untuk menanggulangi masalah tersebut, pada tahun 2014 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan peluncuran Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) menggandeng berbagai pihak terutama bank umum untuk membuka akses pembiayaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat nelayan. Seiring berjalannya pemerintah Indonesia yang semakin fokus terhadap pengembangan potensi sektor perikanan melalui program ini, perbankan semakin banyak yang tertarik untuk berpartisipasi menyalurkan kredit pada pelaku usaha di sektor ini. Terbukti dengan alokasi kredit untuk sektor perikanan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tumbuhnya kredit pada sektor perikanan ini diyakini akan mendorong segala aktivitas ekonomi pada sektor perikanan juga, dimana hal ini memberikan sinyal positif sektor perikanan di masa depan. Terlebih sektor perikanan merupakan sektor strategis yang menjadi satu – satunya harapan di masa depan ketika sektor migas sudah habis. Indonesia sebagai Negara Maritim yang memiliki luas wilayah laut hampir 70%

dari total wilayah yang dimiliki, telah diuntungkan dengan kondisi geografisnya yang memiliki sumber daya perairan sangat melimpah yakni dengan kisaran 5,8 juta km² wilayah laut yang dapat dikelola (berdasarkan konvensi PBB 1982). Tentu saja dengan modal sebesar ini dengan disertai fasilitas pembiayaan yang baik, Indonesia memiliki peluang ekonomi yang sangat cerah di sektor perikanan. Cerahnya potensi sektor perikanan juga didukung dari hasil perikanan yang variatif seperti ikan tuna, udang dan rumput laut yang banyak diminati pasar internasional. Pada tahun 2020 FAO mencatat bahwa Indonesia masih menjadi produsen terbesar kedua dengan tangkapan laut sebanyak 6,43 juta ton, dimana hal ini juga mengindikasikan potensi perikanan Indonesia masih terbesar secara global.

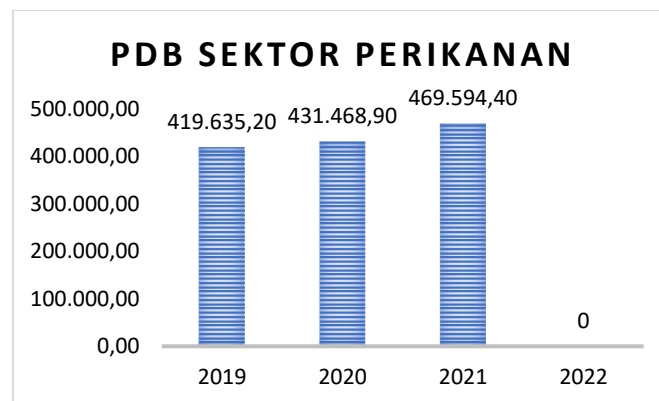
Berdasarkan potensi yang telah disebutkan sektor perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan negara, yang mana kondisi tersebut sangat jauh berbeda selama ini. Sektor perikanan dianggap masih belum memberikan kinerja yang optimal. Tergambar dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB yang tercatat masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 2,8 persen per Januari 2022. Pembiayaan yang cukup melalui penyaluran kredit yang dikucurkan oleh perbankan pada sektor perikanan diharapkan mampu memperbaiki kontribusi sektor perikanan di masa yang akan datang. Namun, pada kenyataannya tinggi rendahnya penyaluran kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi banyaknya aliran kredit tersebut diantaranya, faktor internal yang menjadi pertimbangan pihak perbankan seperti tinggi laba dan rasio kredit macet serta

faktor eksternal seperti faktor dari permintaan kredit pada sektor perikanan itu sendiri.

Berikut merupakan pengaruh volume kredit jika dilihat dari sisi permintaan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Diagram 3

PDB Sektor Perikanan Tahun 2019 - 2022

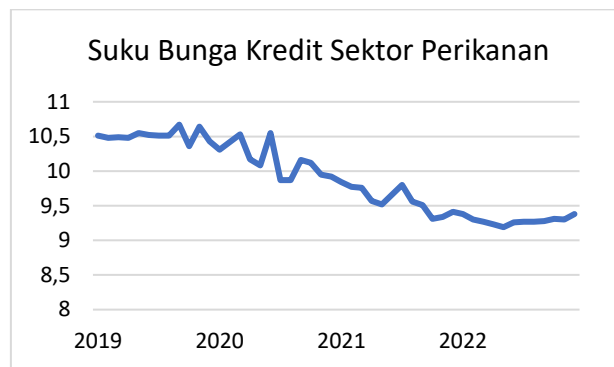


Sumber : BPS 2022 (data diolah)

Tabel di atas menggambarkan PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor perikanan. PDB merupakan salah satu indikator yang mencerminkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi PDB berarti pendapatan masyarakat juga semakin naik. Kenaikan pendapatan merubah pola konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Demikian juga dengan permintaan kredit yang disamakan dengan permintaan akan uang. Semakin tinggi konsumsi masyarakat maka kebutuhan akan uang menjadi lebih tinggi juga . Sesuai dengan teori permintaan uang yang mengatakan permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah (Keynes).

Berdasarkan data di atas diketahui PDB selalu mengalami kenaikan di beberapa tahun terakhir, yang mana hal ini sejalan dengan tumbuhnya kredit sektor perikanan di waktu yang sama.

Diagram 4
Suku Bunga Kredit untuk Sektor Perikanan
Tahun 2019 - 2022



Sumber : OJK 2023 (data diolah)

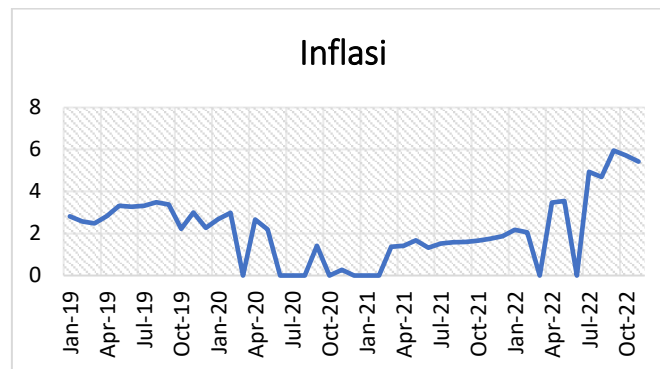
Suku bunga kredit yaitu, sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank atas pinjaman yang telah diberikan. Secara teori suku bunga kredit menjadi salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam pengajuan kredit. Semakin tinggi suku bunga pada saat itu maka artinya semakin tinggi pula harga atau tanggungan yang harus dibayar. Oleh karena itu, semakin tinggi suku bunga semakin menurun permintaan akan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga semakin tinggi kredit.

Kondisi suku bunga pinjaman yang tinggi membuat daya saing perikanan Indonesia yang rendah. Pasalnya masyarakat akan lebih memilih mengandalkan modal sendiri ketimbang harus meminjam di bank. Selama ini suku bunga kredit

sektor perikanan Indonesia masih yang tertinggi, yaitu dengan angka yang masih menembus 10 persen. Suku bunga kredit sektor perikanan ini cukup jauh bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia (4,8 persen), Filipina (5,7 persen), Singapura (5,4 persen) dan Thailand (7,1 persen). Tercermin dari grafik di atas yang menunjukkan suku bunga kredit sektor perikanan tumbuh negatif di beberapa tahun terakhir, di waktu yang sama pula kredit sektor perikanan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Diagram 5

Data Inflasi Tahun 2019 - 2022



Sumber : BI 2023 (data diolah)

Terakhir adalah inflasi, yaitu kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap banyaknya penyaluran kredit. Semakin tinggi inflasi akan semakin menurun permintaan kredit, karena ketika inflasi tinggi suku bunga akan naik, dimana hal ini yang membuat masyarakat enggan mengajukan kredit. Pada situasi ini masyarakat akan lebih memilih untuk menabung daripada konsumsi.

Grafik di atas menunjukkan inflasi yang terus berfluktuasi tidak menentu di beberapa tahun terakhir. Penurunan inflasi yang cukup signifikan terjadi di bulan Oktober 2020 menuju bulan November dengan tinggi inflasi pada bulan Oktober 2020 sebesar 1,44 persen dan pada saat bulan November 2020 turun menjadi 0,28 persen. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada bulan Desember 2020 sebesar 1,68 persen. Inflasi kembali berfluktuasi pada bulan-bulan berikutnya dan berjalan cenderung stabil selama tahun 2021 hingga pada akhir – akhir tahun 2022 inflasi meningkat tajam dan mencapai 5,42 persen di bulan November 2022. Berbeda dengan permintaan kredit yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diketahui jika sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar sektor perikanan justru memiliki aliran kredit yang masih sangat minim. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan kredit tersebut, baik secara internal maupun eksternal, untuk mengetahui lebih dalam lagi, peneliti tertarik meneliti kembali yang berjudul “ Analisis Determinan Kredit Bank Umum Untuk Sektor Perikanan”. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar nantinya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk pihak atau stakeholder yang memiliki kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, diketahui jika permintaan kredit pada sektor perikanan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti, tingkat inflasi, pendapatan nasional dan suku bunga kredit sektor .

Variabel – variabel tersebut mengalami fluktuasi di beberapa waktu, di waktu yang sama permintaan kredit modal pada sektor perikanan berfluktuasi secara umum di setiap tahunnya. Berdasarkan uraian tersebut, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PDB sektor perikanan berpengaruh terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum?
2. Apakah suku bunga kredit sektor perikanan berpengaruh terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh PDB terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga kredit sektor perikanan terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit sektor perikanan pada bank umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada sektor perikanan pada bank umum.
 - b. Sebagai penerapan ilmu dan berbagai teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi pemerintah :
Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dan informasi untuk membuat kebijakan terkait penyaluran kredit bank umum khususnya pada sektor perikanan.
 - b. Dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.